

# BULETIN APBIN Vol. IX, Edisi 3, Februari 2024

# Target Bauran Energi Indonesia Tahun 2023 Kembali Melesat

p.3



Dampak Mandatory Spending Pendidikan terhadap Capaian APS, APK, APM serta Skor PISA

*p*.8

ISO 9001:2015 Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685

# **Dewan Redaksi**

#### Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

#### Penanggung Jawab

Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E.

#### Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

#### Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo Dahiri Martha Carolina Rastri Paramita Rosalina Tineke Kusumawardhani Tio Riyono

#### Editor

Riza Aditya Syafri Orlando Raka Bestianta

# Target Bauran Energi Indonesia Tahun 2023 Kembali Melesat

**p.3** 

Capaian bauran energi primer di tahun 2023 kembali meleset dari target. Tulisan ini akan mengkaji mengenai apa saja yang masih menjadi tantangan dalam meningkatkan bauran energi dan strategi apa yang dibutuhkan untuk dapat mengakselerasi capaian target bauran energi Indonesia di tahun 2025. Tantangan yang masih dihadapi antara lain: belum adanya payung hukum yang mengatur EBT secara khusus, masih terdapat kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung peningkatan bauran energi primer yang berasal dari EBT, dan kurang optimalnya partisipasi masyarakat terutama dalam penyusunan kebijakan energi. Strategi optimalisasi akselerasi bauran energi primer dapat optimal jika antara pemangku kebijakan, seperti Komisi VII DPR RI, pemerintah, dan stakeholder memiliki komitmen politik dan kebijakan yang jelas, terarah serta konsisten dengan target jangka panjang maupun pendek, adanya roadmap yang jelas dan terukur, koordinasi antar pihak yang berwenang, dan pembiayaan murah untuk investasi di EBT.

# Dampak Mandatory Spending Pendidikan terhadap Capaian APS, APK, APM serta Skor PISA

**p.8** 

Mandatory spending terhadap pendidikan membuat alokasi anggaran pendidikan dalam 14 tahun selalu masuk 2 besar dalam APBN. Besarnya alokasi yang diberikan belum sejalan dengan capaian yang diharapkan. Guna meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan program serta mutu pendidikan, pemerataan akses layanan pendidikan dengan mempertimbangkan mempertimbangkan pemerataan antar wilayah dan antar individu, menghadirkan skema pembiayaan pendidikan yang terjangkau bagi mahasiswa yang tidak mampu, penempatan perpustakaan terbuka di setiap kelurahan/desa, menerbitan buku bacaan guna meningkatkan literasi masyarakat Indonesia yang dapat diakses/unduh secara gratis melalui internet.

#### Kritik/Saran

## http://pa3kn.dpr.go.id/kontak

Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.pa3kn.dpr.go.id



Next on Buletin APBN Edisi 4 Menakar Pemerataan Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap

Perubahan Iklim, Pertanian Berkelanjutan dan Produksi Pupuk Organik

# Target Bauran Energi Indonesia Tahun 2023 Kembali Melesat

Rastri Paramita<sup>\*)</sup> Indah Pranchiska<sup>\*)</sup>

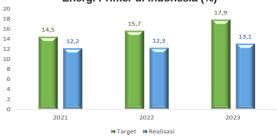
#### Abstrak

Capaian bauran energi primer di tahun 2023 kembali meleset dari target. Tulisan ini akan mengkaji mengenai apa saja yang masih menjadi tantangan dalam meningkatkan bauran energi dan strategi apa yang dibutuhkan untuk dapat mengakselerasi capaian target bauran energi Indonesia di tahun 2025. Tantangan yang masih dihadapi antara lain: belum adanya payung hukum yang mengatur EBT secara khusus, masih terdapat kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung peningkatan bauran energi primer yang berasal dari EBT, dan kurang optimalnya partisipasi masyarakat terutama dalam penyusunan kebijakan energi. Strategi optimalisasi akselerasi bauran energi primer dapat optimal jika antara pemangku kebijakan, seperti Komisi VII DPR RI, pemerintah, dan stakeholder memiliki komitmen politik dan kebijakan yang jelas, terarah serta konsisten dengan target jangka panjang maupun pendek, adanya roadmap yang jelas dan terukur, koordinasi antar pihak yang berwenang, dan pembiayaan murah untuk investasi di EBT.

🕨 apaian bauran energi primer di tahun 2023 kembali meleset, yaitu hanya mencapai nilai 13,1% dari target 17,9%. Bauran energi primer pada tahun 2023 terdiri dari Batubara (40,46%), bumi (30,18%),gas (18,28%), dan Energi Baru Terbarukan/ EBT (13,09%). Capaian bauran masih didominasi oleh batubara, meskipun nilainya sudah mengalami penurunan dibandingkan 2022 tahun sebesar 42,38%. Pentingnya meningkatkan bauran energi primer untuk mendukung program Net Zero Emission Indonesia di tahun 2060. Kinerja yang rendah dari bauran energi primer tahun 2023, belum menyadarkan Pemerintah untuk lebih realisitis dalam menentukan target bauran energi primer setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 kembali meningkat dari tahun 2023, yaitu sebesar 18,49%. Dewan Energi Nasional (DEN) pada tanggal 18 Januari 2024 lalu berencana melakukan adjustment terhadap target bauran energi primer di tahun 2025 dari 23% menjadi 17% - 19% yang akan dituangkan pada revisi PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Perubahan ini menyesuaikan dengan asumsi makro ekonomi yang tidak sesuai dengan prediksi awal dikisaran 7%-8%.

Target bauran energi pada tahun 2025 dapat tercapai dengan asumsi Indonesia telah menggunakan energi terbarukan berupa bioenergi dan bioethanol, namun penggunaan bioethanol hingga saat ini belum terealisasi. Target bauran energi di tahun 2025 dapat tercapai hanya untuk sektor Listrik saja, karena bauran energi primer pada sektor ini sudah mencapai 15%-20%. Terdapat dua pembangkit listrik yang dapat dibangun dan dioperasikan dalam waktu singkat, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dapat mengakselerasi pencapaian target bauran energi di tahun 2025. Kedua jenis pembangkit ini sayangnya memiliki karakteristik *intermittent*, yakni hanya dapat beroperasi pada waktu tertentu kecuali bila menggunakan baterai (DEN, 2024). Kajian ini akan mengulik lebih

Gambar 1. Perkembangan Target & Realisasi Bauran Energi Primer di Indonesia (%)



Sumber: KemenESDM, 2024, (diolah).

<sup>\*)</sup> Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

dalam mengenai apa saja yang masih menjadi tantangan dalam meningkatkan bauran energi agar dapat mencapai target di tahun 2025? Dan strategi apa yang dibutuhkan untuk dapat mengakselerasi capaian target bauran energi Indonesia di tahun 2025?

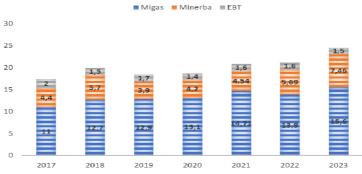
# Tantangan Pelaksanaan Kinerja Bauran Energi

Studi Asian Development Bank (ADB) memprediksi Indonesia akan gagal mencapai target bauran energi melalui EBT yang disebabkan oleh beberapa faktor utama yang menghambat, yaitu: 1) Biaya proyek EBT yang lebih tinggi dibandingkan penetapan harga tertinggi pembelian Listrik; 2) Ketidakmampuan mengintegrasikan **EBT** serta tidak memadainya panduan perencanaan; dan 3) Tingginya biaya dan risiko EBT di Indonesia. ADB juga menginventarisir faktor-faktor lain, misalnya perjanjian pembelian tenaga listrik atau power purchase agreement (PPA) yang tidak berimbang sehingga berdampak pada PPA menjadi kurang bankable dan potensi benturan kepentingan dalam berperan sebagai peran PLN yang perencana, operator, dan juga generator pengembangan EBT di Indonesia.

Rendahnya pencapaian target bauran energi juga disebabkan oleh faktor yang bersifat sistemik, antara lain: adanya keterlambatan lelang pembangkit energi terbarukan oleh PLN sejak 2019; kendala eksekusi proyek-proyek yang sudah kontrak karena *bankability*; peningkatan keuangan dalam bunga dua suku tahun terakhir serta pandemi Covid-19, mundurnya waktu penyelesaian sejumlah proyek EBT, seperti PLTA Batang Toru, PLTP Baturaden, dan PLTO Rajabasa; dan berlarut-larut revisi Permen ESDM 26/2021 sehingga menghambat implementasi PLTS dan **PSN** atap PLTS atap 3,6 GW tidak berjalan (IESR, 2023); dan tingginya intensitas emisi Listrik Indonesia dibandingkan negaranegara kawasan. Kondisi ini menyulitkan Indonesia untuk meningkatkan minat investor multinasional untuk berinvestasi di EBT karena umumnya mereka mensyaratkan ketersediaan listrik rendah emisi.

Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam memperbaiki kinerja peningkatan bauran energi primer kedepannya, antara lain: **pertama**, belum adanya payung hukum yang mengatur EBT secara khusus sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan EBT. Terdapat ketidakselarasan target bauran energi primer dari EBT dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Rencana Umum Energi Daerah (RUED), dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dalam tahap perencanaan. Perbedaan ini disebabkan oleh metodologi, data dasar, serta skenario yang digunakan tidak sama. Terdapat enam provinsi yang belum memiliki RUED yang menggambarkan ketidakpastian dalam mendukung transisi energi nasional serta rendahnya komitmen pemerintah daerah terhadap mendukung kebijakan energi terbarukan. RUED juga masih dianggap formalitas belaka sehingga masih ditemukan ketidakselarasan RUED dengan RUEN. Roadmap yang terukur sebaiknya juga disusun sebagai dokumen pelaksanaan yang mempermudah pembangunan dan pengembangan EBT. Pelaksanaan pembangunan EBT saat ini masih menemui perbedaan hasil yang diperoleh antara satu sektor dengan sektor yang lain. Contohnya pada sektor transportasi, kontribusi EBT bersumber dari campuran biodiesel. terutama Kontribusi EBT pada pembangkit listrik juga hanya mampu mencapai sepertiga dari total produksi EBT, terutama dari sumber tenaga air dan panas bumi, dan sangat kecil kontribusi yang berasal dari tenaga surya serta angin. Masih terdapat penundaan pembangunan proyek EBT sehingga menyebabkan perlambatan pertumbuhan kapasitas EBT dan potensi tidak tercapainya target bauran energi primer di tahun 2030, seperti penundaan pembangkit beberapa proyek listrik tenaga air dan panas bumi. Komitmen pembangunan EBT oleh stakeholder yang terlibat juga rendah akibat belum adanya

Gambar 2. Realisasi Investasi Migas, Minerba, dan EBT (USD Miliar, unaudited)



Sumber: Kemen ESDM (dalam Katadata, 2024), (diolah).

aturan yang memaksa. Contohnya perlambatan pembangunan EBT pada sektor ketenagalistrikan, dimana target terpasang di tahun 2021 mencapai 3,4 GW hanya dapat terpasang 1 GW di tahun 2023. Realisasi investasi EBT di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan migas dan minerba. Realisasi investasi EBT ini juga menurun nilainya dibandingkan dengan tahun 2022 (gambar 2).

Kedua. masih terdapat kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung peningkatan bauran energi primer yang berasal dari EBT. Hal ini terbukti dari masih terdapat kebijakan subsidi bahan bakar dan listrik, kompensasi untuk energi primer yang berasal dari fosil, adanya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batubara, dan subsidi langsung, menyebabkan masyarakat sehingga enggan mengubah sumber energi primernya ke EBT. Kebijakan inilah yang membuat batubara dan minyak bumi masih mendominasi kontribusi terhadap bauran energi primer di Indonesia. Harga listrik yang berasal dari EBT saat ini masih kalah ekonomis yaitu rata-rata senilai Rp1.500 per *kilowatt-hour* (kWh) dibandingkan dengan harga listrik yang energi primernya bersumber dari fosil sebesar Rp500-Rp700 per kWh. Ketiga, kurang optimalnya partisipasi masyarakat terutama dalam penyusunan kebijakan energi. Kondisi partisipasi masyarakat terkait energi dapat dikategorikan sebagai tokenisme, yang bermakna partisipasi masyarakat masih terbatas

pada tindakan formalitas, keputusan akhir masih tetap berada di tangan pemerintah 2019). Perlu (Gaber, ada meningkatkan kualitas dan signifikansi partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan energi yang berimbang serta Salah berkeadilan. satunya melalui perbaikan regulasi mengenai mekanisme untuk mendengar aspirasi masyarakat terhadap kebijakan yang menyangkut energi.

#### Strategi Optimalisasi Akselerasi Bauran Energi Primer Kedepannya

Akselerasi bauran energi primer dapat optimal jika antara pemangku kebijakan seperti Komisi VII DPR RI dan Pemerintah memiliki komitmen politik dan kebijakan yang jelas, terarah serta konsisten dengan target jangka panjang maupun pendek. Komitmen ini dapat menjadi dasar bagi investor dalam negeri maupun luar negeri untuk memproyeksikan bisnis mereka di jangka menengah hingga panjang dan memberikan kepastian hukum untuk berusaha di pengembangan bauran energi primer berupa EBT. Salah satu komitmen yang dibutuhkan adalah penyelesaian RUU EBT dengan secepatnya dan sesuai dengan asas berimbang serta berkeadilan bagi masyarakat. Pemerintah juga harus mengetahui secara persis sumber EBT mana yang lebih ekonomis dari sisi biaya untuk dikembangkan dan memiliki ketersediaan sumbernya lebih konsisten. Setelah memilih EBT yang akan menjadi bauran energi primer utama, selanjutnya pemerintah membuat kebijakan

regulasi yang jelas dan terarah untuk mengembangkan EBT tersebut. Penyederhanaan proses dan prosedur administrasi yang lugas, sederhana dan transparan juga harus dibangun agar memberikan kemudahan investor dalam berinvestasi di sektor EBT.

Penyusunan roadmap yang ielas dan terukur dan melibatkan berbagai pihak yang terdampak dan berwenang penyusunan kebijakan dalam juga sangat dibutuhkan. Melalui roadmap ini diharapkan dapat menyelaraskan target bauran antara KEN, RUEN, RUPTL, dan RUED. Roadmap ini juga sebaiknya menggambarkan secara rinci tahapan harus dilakukan terlebih vang dahulu, kemudian bentuk pengembangan berikutnya, bentuk koordinasi di setiap tahap, bentuk evaluasi di setiap tahap, bentuk partisipasi masyarakat di setiap tahapan hingga tahapan akhir yang diharapkan dari pengembangan bauran energi primer di Indonesia. Melalui roadmap yang jelas, diharapkan dapat mendukung akselerasi bauran energi primer sesuai dengan target di RUEN. satu penentu keberhasilannya adalah seberapa jauh masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan. Peran Komisi VII DPR RI untuk mengawasi dan mengadvokasi kepentingan masyarakat sangat perlu ditingkatkan, salah satunya melalui penyerapan aspirasi ketika kunjugan ke daerah pemilihan maupun kunjungan dalam membahas kebijakan terkait energi.

Setelah adanya komitmen politik dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang jelas, strategi Pemerintah selanjutnya dapat menawarkan pembiayaan yang murah untuk membangun sektor energi primer dari EBT. Pembiayaan ini dapat berupa disesuaikan pemberian subsidi yang dengan jumlah investasi, karakteristik EBT yang akan dikembangkan serta kesulitan geografis yang dihadapi dalam Pembangunan dan pengembangan EBT tersebut. Bentuk lain pembiayaan pembangunan maupun pengembangan primer berupa EBT adalah mengeluarkan sukuk yang ditujukan untuk pembangunan atau pengembangan EBT. Alternatif pembiayaan lain dapat berupa Pemerintah membentuk fund dikhususkan bagi pengembangan EBT baik pendanaan dari dunia internasional maupun dari dalam negeri. Fund ini juga memiliki tugas pendampingan finansial kepada pengembang provek serta optimalisasi pendanaan secara publik. Agar lebih optimal, Komisi VII DPR RI juga perlu mendorong pemerintah memiliki komitmen kuat dalam mengurangi bahkan mengganti kebijakan populis yang tidak mendukung akselerasi bauran energi primer yang berasal dari EBT, seperti subsidi energi dan listrik. Pengalihan bantuan subsidi energi dan listrik ke bantuan tunai atau meningkatkan bantuan sosial bagi rakyat prasejahtera merupakan salah satu opsi yang dapat dilakukan.

Tahapan selanjutnya yang dapat menjadi bagian dari strategi akselerasi bauran EBT kedepannya adalah Pemerintah dapat mengkoordinasi berbagai pihak yang berwenang terkait pra investasi EBT. Koordinasi pra investasi tersebut, seperti: mempermudah antara lain akuisisi lahan, perizinan yang lintas sektor, pemberian insentif yang sesuai karakteristik dengan **EBT** maupun kesulitan geografis pembangun SDM yang sesuai dengan tersebut, kebutuhan pasar EBT, dan ketersediaan infrastruktur. Koordinasi ini dapat menunjuk Kementerian yang berwenang dibidang energi atau Pemerintah dapat membuat perusahaan milik negara khusus membantu pencapaian bauran energi primer yang berasal dari EBT. Perusahaan inilah yang harus berkoordinasi dengan antar stakeholder yang berwenang dalam mengembangkan ekosistem EBT di Indonesia. Strategi lain yang dapat berkontribusi dalam mengakselerasi bauran energi primer EBT yaitu Pemerintah menjamin ketersediaan jaringan dan penyerapan agar tidak terjadi *curtailment* (pembatasan). Strategi ini juga dapat didukung dengan skema inovatif yang mendorong pemanfaatan EBT bagi beragam sektor, contohnya direct PPA yang memungkinkan sektor

komersial atau industri untuk menjual atau mendapatkan listrik dari EBT secara langsung dari perusahaan lain. Kepastian penyerapan EBT juga dapat berupa reformasi subsidi listrik dan tarif Listrik dengan penggunaan EBT.

#### **Daftar Pustaka**

Betahita. (2023). Indonesia Butuh Strategi Baru Capai 23% Bauran Energi Terbarukan. Diakses melalui: https://betahita.id/news/detail/9061/indonesia-butuh-strategi-baru-capai-23-bauran-energi-terbarukan.html?v=1692103269, pada tanggal 24 Januari 2024.

CNNIndonesia. (2024). Target Bauran EBT RI 2025 Turun Jadi 17%, Ini Alasan ESDM... Diakses melalui: https://www.cnbcindonesia.com/news/20240118173844-4-507048/target-bauran-ebt-ri-2025-turun-jadi-17-ini-alasan-esdm, pada tanggal 24 Januari 2024.

CNNIndonesia. (2024). Realisasi Bauran EBT di Energi Primer 2023 Belum Capai Target. Diakses melalui: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240115193003-85-1049878/realisasi-bauran-ebt-di-energi-primer-2023-belum-capai-target, pada tanggal 21 Januari 2024.

Fresidy, Budi; dan R.Irawan. (2024). Opini: Prospek Pencapaian Bauran EBT. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Diakses melalui: https://feb.ui.ac.id/2024/01/16/opini-prospek-pencapaian-bauran-ebt/, pada tanggal 24 Januari 2024.

IESR. (2020). Mengadopsi "Resep Surya" India dan Vietnam Untuk Indonesia. Diakses melalui https://iesr. or.id/mengadopsi-resep-surya-india-dan-vietnam-untuk-indonesia, pada tanggal 31 Januari 2024.

IESR. (2023). Menilik Potensi dan Tantangan Dalam Perjalanan Indonesia Capai Menuju Masa Depan Berkelanjutan. Diakses melalui: https://iesr.or.id/menilik-potensi-dan-tantangan-dalam-perjalanan-indonesia-capai-menuju-masa-depan-berkelanjutan, pada tanggal 23Januari 2024.

IESR. (2023). IESR: Indonesia Perlu Strategi Baru Untuk Capai 23% Bauran Energi Terbarukan Pada 2025. Diakses melalui: https://iesr.or.id/iesr-indonesia-perlu-strategi-baru-untuk-capai-23-bauran-energi-terbarukan-pada-2025, pada tanggal 21 Januari 2024.

IESR. (2024). Mengejar Target 23% Bauran ENergi Terbarukan di 2025 Memerlukan Strategi Percepatan Dan Komitmen Politik. Diakses melalui: https://iesr.or.id/mengejar-target-23-bauran-energi-terbarukan-di-2025-memerlukan-strategi-percepatan-dan-komitmen-politik, pada tanggal 21 Januari 2024.

Katadata. (2024). Investasi EBT Turun Pada 2023, Migas dan Minerba Naik. Diakses melalui https://databoks.katadata. co.id/datapublish/2024/01/24/investasiebt-turun-pada-2023-migas-dan-minerbanaik, pada tanggal 1 Februari 2024.

Kementerian ESDM. (2024). Pemerintah Kejar Target Tingkatkan Bauran EBT. Diakses melalui: https://www. esdm.go.id/id/media-center/arsipberita/pemerintah-kejar-tingkatkanbauran-ebt#:~:text=Berdasarkan%20 data%20DEN%2C%20persentase%20 bauran, %2C09%25%20pada%20 tahun%202023, pada tanggal 21 Januari 2024.

Kompas. (2023). Tantangan dan Peluang Energi Baru Terbarukan di Indonesia. Diakses melalui: https://lestari.kompas.com/read/2023/05/04/203000886/tantangan-dan-peluang-energi-baruterbarukan-di-indonesia, pada tanggal 22 Januari 2024.

# Dampak Mandatory Spending Pendidikan terhadap Capaian APS, APK, APM serta Skor PISA

Adhi Prasetyo\*)
Leo Iskandar\*)

#### Abstrak

Mandatory spending terhadap pendidikan membuat alokasi anggaran pendidikan dalam 14 tahun selalu masuk 2 besar dalam APBN. Besarnya alokasi yang diberikan belum sejalan dengan capaian yang diharapkan. Guna meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan program serta mutu pendidikan, pemerataan akses layanan pendidikan dengan mempertimbangkan mempertimbangkan pemerataan antar wilayah dan antar individu, menghadirkan skema pembiayaan pendidikan yang terjangkau bagi mahasiswa yang tidak mampu, penempatan perpustakaan terbuka di setiap kelurahan/desa, menerbitan buku bacaan guna meningkatkan literasi masyarakat Indonesia yang dapat diakses/unduh secara gratis melalui internet.

udut pandang yang menganggap aset utama bangsa adalah sumber daya alam merupakan paradigma lama. Paradigma saat ini adalah menempatkan sumber daya manusia sebagai utama sebuah (SDM) aset dalam membangun sebuah bangsa Pembangunan kedepan. peradaban kualitas SDM yang unggul tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan daya saing suatu negara. Konstitusi sendiri telah kewajiban dengan mengatur tegas negara dalam menyediakan pendidikan bagi warga negaranya. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan serta wajib mengikuti pendidikan dasar pemerintah wajib membiayainya. Negara sebagaimana tertuang dalam ayat 4 juga memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Perintah konstitusi tersebut selanjutnya lebih diperjelas dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib mengalokasikan

anggaran APBN sebesar 20 persen untuk dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Badan Pusat Statistik menggunakan tiga indikator dalam pembangunan mengukur pendidikan vaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka Partisipasi Murni (APM) yang juga tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen RPJMN 2020-2024 tercatat juga menggunakan PISA (the programme for international student assessment) sebagai salah satu targetnya. Tulisan ini hendak menganalisis capaian pendidikan Indonesia paska penerapan anggaran pendidikan 20 persen, terhadap APS, APK, APM serta PISA.

### Anggaran Pendidikan Terus Meningkat

Alokasi anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN sejak tahun 2009 telah dipenuhi oleh pemerintah. Pemenuhan mandat ini berimplikasi pada peningkatan anggaran pendidikan yang besar sebagai anggaran rutin digelontorkan setiap tahunnya. Alokasi anggaran pendidikan sejak tahun 2009–2014, tercatat sebagai belanja terbesar kedua, setelah belanja subsidi. Total anggaran pendidikan yang telah dikucurkan oleh pemerintah melalui APBN secara keseluruhan sejak tahun 2009 mencapai Rp6.625,8 triliun dan terus meningkat setiap tahunnya dengan

<sup>\*)</sup> Analis APBN ASN, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

rerata pertumbuhan 8,3 persen setiap tahunnya. Kebijakan pemerintah pada periode 2009-2014 lebih mendorong alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan melalui belanja pemerintah pusat. Periode setelah tahun 2015, pemerintah mulai fokus terhadap pembiayaan yang terlihat dari porsi alokasi pada APBN yang mengalami pertumbuhan setiap tahun.

#### Capaian APS, APK dan APM

Keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat terlihat dari terbukanya kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Banyaknya penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase warga menurut partisipasi sekolah. Capaian partisipasi sekolah di Indonesia dalam suatu wilayah sejak tahun 2009 dapat dilihat melalui APS, APK, serta APM (gambar 1).

Gambar 1. Capaian APS, APK dan APM Tahun 2009-2023

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Partsipasi Sekolah (APS) 7-12 th	98,0	98,0	97,5	97,9	98,3	98,8	98,8	99,0	99,1	99,1	99,2	99,2	99,1	99,0	99,1
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 th	85,4	86,1	87,8	89,6	90,6	94,3	94,2	94,8	95,0	95,2	95,4	95,5	95,8	95,8	98,0
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 th	55,1	55,8	57,7	61,3	63,6	70,1	70,3	70,7	71,2	71,8	71,9	71,4	70,7	72,9	73,1
Angka Partsipasi Sekolah (APS) 19-24 th	12,7	13,7	14,5	15,9	20,0	22,7	22,8	23,8	24,7	24,3	23,3	22,5	23,3	24,6	25,0
Angka Partisipasi Kasar (APK) SDMI	110,4	111.8	102.4	104.2	107.8	108.8	109.9	109.2	108.4	108.5	107.4	108.0	105.8	108.1	105,3
Angka Partsipasi Kasar (APK) SMPMTs	81,1	80,4	89,4	89,3	85,7	88,4	90,8	90,0	90,0	91,2	90,2	88,9	85,9	87,8	91,2
Angka Partsipasi Kasar (APK) SMMA	62,4	82,5	84,1	68,5	66,3	74,0	77,4	80,4	82,2	80,1	79,9	78,6	80,2	80,2	81,7
Angka Partisipasi Kasar (APK) PT 19-24 th	14,6	16,4	18,1	18,9	23,1	25,8	20,9	23,4	25,0	25,1	25,1	25,5	28,1	28,3	28,9
Angka Partsipasi Murri (APM) SDMI	94,4	94.7	91,0	92,5	95,5	98,4	96.2	98,7	97,1	97,5	97,6	97,6	97.7	97.8	97,9
Angka Partisipasi Murni (APM) SMPMTs	67,4	67,6	88.2	70,8	73,7	77,4	77,5	77,9	78,3	78,7	79,4	80,0	80,5	80,8	81,3
Angka Partisipasi Murni (APM) SM/MA	45,1	45,5	47,9	51,8	54,1	59,2	59,5	59,8	60,2	80,5	60,7	61,0	61,5	81,7	62,4
Angka Partisipasi Murni (APM) PT 19-24 th	10,3	11,0	12,6	13.5	18.1	202	17.3	17.9	18.6	18.6	18.8	19.3	19.6	20.8	20,8

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024, (diolah).

Indikator APS terbagi dalam empat kategori kelompok umur yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. APS merupakan indikator untuk mengukur daya serap lembaga pendidikan terhadap masvarakat usia sekolah. Semakin tinggi capaian APS, semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Capaian APS tahun 2023 pada masing-masing kelompok umur cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2009. Jangkauan APS pada kelompok umur 7-12 tahun telah berada di angka 99,2 persen, pada umur 13-15 tahun sebesar 96,1 persen. berbeda ditunjukkan jangkauan Hasil **APS** kelompok umur 16-18 tahun, mengalami meskipun pertumbuhan setiap tahunnya perolehan tersebut menunjukkan program wajib belajar 12 tahun yang ditetapkan oleh pemerintah boleh dikatakan belum berhasil.

Terhitung sejak 2015 program tersebut ditetapkan hingga saat ini nyatanya belum mampu mendongkrak raihan APS kelompok umur 16-18 tahun berada dikisaran 95 persen. Kondisi APS usia 19-24 tahun atau yang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi tercatat masih rendah hanya berada persen. diangka 26,9 Rendahnya penduduk yang mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi disebabkan seseorang akan cenderung memutuskan untuk bekerja atau menikah dibanding bersekolah ketika umur semakin bertambah (Arum dan Adry, 2020). Penelitian Virdam dan Ariani (2023) menemukan bahwa semakin tinggi penghasilan yang masyarakat peroleh, memudahkan masyarakat akan dalam mengakses fasilitas pendidikan sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah. Jumlah penduduk miskin per Desember 2023 masih mencapai 25,9 juta penduduk atau 9,36 persen. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah bagaimana menjaga agar kelompok ini mampu tetap menyekolahkan keluarganya ditengah ekonomi himpitan yang melanda.

Indikator paling sederhana guna menilai daya tampung warga usia sekolah di masing-masing pendidikan jenjang adalah APK. Semakin tinggi capaian APK. menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah di jenjang pendidikan Perolehan tersebut. APK keseluruhan sejak tahun 2009 hingga 2023 menunjukkan grafik yang terus meningkat. Catatan khusus diberikan terhadap capaian APK SD/MI/Paket A yang pada tahun 2023 justru mengalami kemunduran menjadi 105,6 dari 106,3 di tahun sebelumnya. Kondisi ini tentu perlu

menjadi perhatian pemerintah, selain itu APK pada jenjang SMP dan SMA juga perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mensukseskan program wajib belajar 12 Sejalan dengan dua penelitian yang sampaikan sebelumnya, tingginya biaya pendidikan khususnya perguruan tinggi membuat warga dengan kondisi penghasilan terbatas membuat mereka tidak punya pilihan selain untuk membantu perekonomian bekerja ketimbang melanjutkan keluarga pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini yang membuat indicator APK perguruan tinggi tidak jauh berbeda dengan APS kelompok usia 19-24 tahun.

APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai atau tepat waktu. Semakin tinggi APM mempunyai makna bahwa semakin sekolah banyak anak usia vang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Capaian APM secara keseluruhan sejak tahun 2009 memang pertumbuhan. mengalami Meruiuk gambar 1, ditemukan catatan menarik vaitu ditengah kinerja pemerintah yang masih perlu ditingkatkan dalam rangka mendongkrak APM pada jenjang sekolah menengah. Pemerintah dihadapkan pada konsistensi menjaga capaian APM pada level SD/MI dan PT, sebagaimana ditunjukkan perolehan APM SD/MI (tahun 2011 dan 2015) serta APM PT (tahun 2023) yang sempat mengalami penurunan.

Kebijakan mandatory spending terhadap anggaran pendidikan diiringi adanya revisi program wajib belajar dari 9 tahun menjadi 12 tahun. Program tersebut merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Keberhasilan waiib belajar tersebut dapat dikatakan berhasil apabila capaian dari APS, APK dan APM berada di atas angka 95 persen. Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah melalui berbagai kebijakan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, program beasiswa

afirmasi/bidikmisi, pengembangan Balai Latihan Kerja Komunitas, Program Kartu Prakerja, dana abadi di bidang pendidikan, program guru penggerak.

Praktik penyaluran BOS dan PIP yang bertujuan guna meringankan biaya nyatanya belum pendidikan, optimal dalam meningkatkan tingkat penyelesaian pendidikan yang diharapkan. Program tersebut menghadapi beberapa kendala, diantaranya faktor geografis yang menyebabkan penyaluran bantuan belum optimal, validasi data BOS dan PIP yang masih memerlukan waktu serta faktor sosial ekonomi yang menyebabkan peserta didik lebih memilih putus sekolah untuk kemudian (Kemendikbudristek, bekerja 2022).

Program beasiswa Bidikmisi pun bukan catatan. Badan Pemeriksa tanpa Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa masih adanya kelemahan dalam pengelolaan program beasiswa, baik pada aspek pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, maupun aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas yang antara lain mengakibatkan bantuan beasiswa tidak dapat segera dimanfaatkan oleh perguruan tinggi maupun mahasiswa, penyaluran beasiswa berpotensi tidak tepat sasaran, pemborosan keuangan negara atas bantuan keuangan yang tidak sesuai persyaratan, dan penerimaan kekurangan atas sisa dana pengelolaan beasiswa. Ketidak tepat sasaran tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh pinjaman online dalam menghadirkan solusi pembiayaan uang kuliah bagi mahasiswa. Skema ini tentu berpotensi menimbulkan masalah baru dikemudian hari bagi mahasiswa yang berasal dari kalangan tidak mampu.

Merujuk hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh penulis, meskipun anggaran pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap APS, APK dan APM namun capaian pertumbuhannya masih minus sekitar dua persen per tahun

Gambar 2. Skor dan Peringkat PISA Indonesia Tahun 2000-2022

Tahun	Materi	Skor Indonesia	Skor Rerata Dunia	Peringkat Dunia	Jumlah Negara	
2000	Membaca	371	500	39		
	Matematika	367	500	39	41	
	Sains	393	500	38		
2003	Membaca	382	500	39		
	Matematika	360	500	38	40	
	Sains	395	500	38		
2006	Membaca	393	500	48		
	Matematika	396	500	50	56	
	Sains	393	500	50		
2009	Membaca	402	500	57		
	Matematika	371	500	61	65	
	Sains	383	500	60		
	Membaca	396	500	62		
2012	Matematika	375	500	64	65	
	Sains	382	500	64		
2015	Membaca	397	500	61		
	Matematika	386	500	63	69	
	Sains	403	500	62		
2018	Membaca	371	500	74		
	Matematika	379	500	73	79	
	Sains	396	500	71		
2022	Membaca	359	476	69		
	Matematika	366	472	69	81	
	Sains	383	383 485 65		1	

Sumber: OECD,2023, (diolah).

untuk setiap indikatornya. Orkestrasi kebijakan dan kolaborasi pemangku kepentingan diperlukan pun rangka mewujudkan capaian minimal 95 persen pada APS, APK dan APM. Komisi X DPR RI dapat merekomendasikan beberapa strategi yang dapat dilakukan Kementerian Pendidikan. dan Kebudayaan, Riset. Teknologi (Kemendikbudristek) antara lain: pertama, evaluasi dan mengoptimalkan program pendidikan program yang selama ini telah dilakukan, seperti BOS dan PIP, baik melalui perbaikan penetapan target sasaran, pengawasan, maupun peningkatan nilai manfaat yang diberikan khususnya pada daerah dengan angka putus sekolah yang tinggi dan APK di bawah rata-rata. Kedua. peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan minimal per kelurahan melalui pembangunan sekolah (SMP-SMA) khususnya daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Langkah ini diperlukan agar kelompok umur 16-18 tahun dapat menuntaskan wajib belajar 12 tahun. Ketiga, menghadirkan skema pembiayaan pendidikan yang terjangkau bagi mahasiswa tidak mampu dan tidak tercover beasiswa pemerintah.

#### Perkembangan Skor PISA

Indonesia sejak tahun 2000 menggunakan referensi PISA guna mengukur capaian belajar siswa usia 15 tahun dengan negara-negara di dunia. Dokumen RPJMN 2020-2024 tercatat

menggunakan PISA sebagai salah satu target. Pemerintah sendiri dalam RPJMN menargetkan skor matematika 388, sains 402 dan membaca 392. Terhitung sejak tahun 2000 hingga 2018, telah terjadi tiga kali perubahan kurikulum, yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) diterapkan mulai tahun 2004, kemudian dirubah ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada tahun 2006, dan kemudian dirubah ke Kurikulum 2013 (K13) yang mulai diterapkan secara bertahap 2013. seiak tahun Terbaru. tahun 2022 Kemendikbudristek meluncurkan kurikulum merdeka menggantikan K13. Kurikulum tersebut merupakan bagian dari program merdeka belajar yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kompetensi peserta didik dalam hal literasi, numerasi, soft skills, dan karakter.

Perubahan kurikulum vang telah dilakukan sebelum tahun 2022 tersebut, nyatanya tidak mampu meningkatkan PISA Indonesia. Pencapaian skor pada tahun 2022 khususnya literasi, tercatat merupakan skor terendah sejak Indonesia mengikuti penilaian PISA tahun 2000. Kemendikbudristek sayangnya dengan kondisi tersebut, justru mengedepankan kenaikan skor literasi membaca dan matematika yang naik 5 posisi dan sains yang naik 6 tingkat. Kemendikbudristek juga menyampaikan bahwa skor PISA Indonesia 2022 tidak mencerminkan kualitas pendidikan saat ini, hal ini lantaran tes PISA diambil saat sekolah libur akibat pandemi Covid-19.

Survei yang dilakukan Organisation for Economic Co-operation and Development sejatinya juga dilakukan disaat seluruh dunia mengalami pagebluk sehingga seharusnya ini tidak dapat dijadikan Kemendikbudristek. iustifikasi oleh Dokumen RPJMN secara tegas juga menyampaikan bahwa target PISA adalah skor bukan peringkat. Karena itu, pemeringkatan sebenarnya tidak begitu penting mengingat tantangan setiap negara tidak dapat diurutkan berdasarkan peringkatnya. Penilaian terhadap PISA sebenarnya bertujuan mempersiapkan pendidikan guna memberi pembekalan siswa untuk menghadapi tantangan kehidupan sesungguhnya dan kesuksesan di masa depan.

Pendidikan Indonesia di masa mendatang dapat menjadi lebih baik dengan melakukan beberapa perbaikan baik dari aspek aksesibilitas, sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidikan, pendidikan keluaran maupun mutu melalui intervensi anggaran 20 persen dilakukan pemerintah. X DPR RI perlu merekomendasikan beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah, antara lain: pertama, peningkatan mutu keluaran pendidikan melalui pelatihan tenaga pendidik, kesejahteraan peningkatan melalui pemberian insentif bagi guru berprestasi serta investasi pendidikan yang dimulai sejak usia dini. Peningkatan kualitas gur dapat diwujudkan melalui pelatihan yang diarahkan untuk meningkatkan penguasaan konten pembelajaran dan proses pembelajaran (pedagogi). Kedua, penempatan perpustakaan terbuka bagi masyarakat vang tersedia di setiap kelurahan maupun desa dengan buku yang berkualitas. Ketiga, menerbitan buku bacaan untuk peningkatan literasi masyarakat Indonesia yang dapat diakses/unduh secara gratis melalui internet. Terakhir, kebijakan diarahkan seluruh yang meningkatkan aksesibilitas untuk warga terhadap pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta perbaikan ketersediaan dan kualitas

tenaga pendidikan harus berdimensi dan mempertimbangkan pemerataan antar wilayah dan antar individu.

#### **Daftar Pustaka**

Arum, Amalia Pangesti, dan Melty Roza Adry. (2020). Analisis Determinan Partisipasi Sekolah di Provinsi Jambi. Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, 9(1).

Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Pendidikan Volume 12. Jakarta: Badan Pusat Statistik

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Programme* for International Student Assessment. Diakses dari: https://www.oecd.org/pisa/ pada 24 Januari 2024

Kementerian Keuangan. (2023). Buku II Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016-2024. Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Laporan Kinerja 2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Fiona Virdam, Maria Bernadette Nani Ariani. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah pada Provinsi di Pulau Sulawesi. Jurnal of Development Economic and Digitalization, Vol. 2, No. 1.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Mengkaji Kembali Hasil PISA sebagai Pendekatan Inovasi Pembelajaran untuk Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi. Diakses dari: https://gurudikdas.kemdikbud.go.id/news/mengkaji-kembalihasil-pisa-sebagai-pendekatan-inovasi-pembelajaran--untuk-peningkatan-kompetensi-li, pada 24 Januari 2024

# **PRODUK TERBARU**

Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara

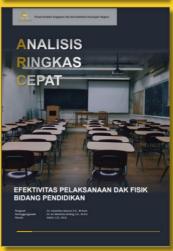


BADAN KEAHLIAN DPR RI Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament "EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"









Baca Selengkapnya







# Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

www.pa3kn.dpr.go.id Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635 Instagram: @pa3kn.bkdprri Youtube: PA3KN BK DPR RI

